LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN KERJA LAPANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN PETISAH

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi D3 Manajemen Perpajakan

Oleh:

DONI SYAHPUTRA NPM: 1405190023



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN KERJA LAPANGAN

Laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan ini disusun oleh:

NAMA

DONI SYAHPUTRA

NPM

1405190023

JURUSAN/PROGRAM STUDI

: MANAJEMEN PERPAJAKAN

TEMPAT PPKL

: KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan.

Medan, Maret 2017

Ketua Program Studi

Pembimbing

JASMAN SYARIFUDDIN HSB, SE, M.Si

Hj.HAFSAH SE. M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Kepala Sub Bagian Umum

UMSU

KPP Pratama Medan Petisah

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRA

ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si

OENALD SRH. HUTAGALUNG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

UNIVERSITAS / PTS

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS

: EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN/PROG.STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN

JENJANG PENDIDIKAN: DIPLOMA III (D-III)

KETUA PROGRAM STUDI: JASMAN SYARIFUDDIN HASIBUAN, SE, M.Si

DOSEN PEMBIMBING

: Hj. HAFSAH SE. M.Si

NAMA MAHASISWA

: DONI SYAHPUTRA

NPM

: 1405190023

TEMPAT MAGANG

: KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
1/2 2017	Perbaile format penul	Sau	
	perbailer bab ?		
	perbarki bab 11	Da	
	/	1 -	
4/ 2017	prosedur kespa belum ge	les	
13	Marasikan Sesuai deug	au o	
	prosedur kesja belum ge Marasikan Sesuai deng Kegiatan yang di kerjan	Ean De	
71 2017	perbater bestati : your	ada Ju	
/3	, 0	01.	
9/ 2017	Selesai Bimbingan	de	
13 217	O	9-	

Pembimbing Magang

Medan,

Maret 2017

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi

Hi. HAFSAH SE. M.Si

JASMAN SYARIFUDDIN, SE, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyusun dan dapat menyelesaikan Peraktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL)

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua beserta kelurga yang telah banyak memberikan bantuan moril, materil, arahan, dan do'a demi keberhasilan dan kesalamatan penulis dalam menempuh pendidikan,
- Bapak Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Bapak Zulaspan Tupti. SE.M sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- 4. Bapak Januri. SE. MM. M.Si sebagai PD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Ade Gunawan. SE M.Si sebagai PD III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Bapak Jasman Syarifuddin. SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen
 Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara,
- 7. Ibu Hafsah. SE, M.Si selaku Dosen pembimbing,
- 8. Seluruh Dosen Pengajar Khususnya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- Bapak Ronald SRH Hutagalung selaku Kepala sub Bagian Umum KPP
 Pratama Medan petisah
- 10. Bapak Erik selaku Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Medan petisah
- 11. Seluruh Staff/Pegawai KPP Pratama Medan petisah
- 12. Teman teman saya Adi syahputra Manik, Haryadi saraan, Junaidi Berutu, Junaidy Lingga, Kakak Elisabet Bakara, Ilham Yusuf Siregar, Alwi Cibro,khairul anwar hasibuan, dan Rekan-rekan yang ada di Fakultas Ekonomi manajemen Perpajakan Angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan Laporan Peraktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) ini.

Selaku manusia biasa, penulis menyadari bahwa Laporan Peraktek Pengalaman Kerja Lapangan (PPKL) ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan.

Medan, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

		Halamaı
KATA	A PENGANTAR	i
DAFI	TAR ISI	ii
DAFT	TAR GAMBAR	v
DAFT	TAR LAMPIRAN	vi
BAB	PENDAHULUAN	1
1.	Latar Belakang Program Pengalaman Kerja Lapangan	1
2.	Ruang Lingkup Program Pengalaman Kerja Lapangan	3
3.	Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan	4
BAB I	II: A. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	7
1.	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah	7
	a. Sejarah Umum KPP Pratama Medan Petisah	7
	b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan	
	Petisah	13
	Petisah	15
	d. Deskrsi Kerja KPP Pratama Medan Petisah	15
2.	Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan	. 19
	a. Jenis dan Bentuk Program Pengalaman Kerja Lapangan	19
	b. Prosedur kerja	22
1. 3	c. Kendala Kerja dan Pemecahannya	22
	B. Pembahasan	24
	Penagihan Wajib Pajak yang Terutang KPP Pratama	
	Medan Petisah a. Pengertian pajak	24 24
	b. Pengertian penagihan pajak	24
	c. Jenis-jenis penagihan pajak	24
w.	d. Tahapan penagihan pajak	25
	e. Dasar penagihan pajak	27
	f. Bunga penagihan pajak	32
	g. Biaya penagihan pajak	33
	h. Kadaluwarsa tindakan penagihan pajak	33
	i. Jadwal waktu penagihan	34
in the	j. Penagihan pajak seketika dan sekaligus	34

BAB 111	KESIMPULAN DAN SARAN	*
a.	Kesimpulan	4
b.	Saran	
DAFTAR	PUSTAKA	4
LAMPIRA	AN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.	Logo Direktorat jendral Pajak	12
2.	Struktur Organisasi	14

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- 2. Laporan Pelaksanaan Surat Paksa
- 3. Berita Acara pemberitahuan Surat paksa
- 4. Surat Paksa
- 5. Surat Teguran

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Program Pengalaman kerja Lapangan

Ilmu pengetahuan dan tekhnologi terus mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman dan cara berfikir manusia. saat ini perkembangan ilmu tekhnologi berkembang sangat cepat. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia perkembangan tekhnologi dan pengetahuan sangatlah penting, perbaikan mental serta kualitas sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan bagi perkembangan dan kualitas hidup bangsa, dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu bangsa dalam mengimbangi tekhnologi yang terus berkembang.

Jika sumber daya manusia terus di perbaiki dan ditingkatkan dengan sistem pendidikan yang mapan dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka dari sistem pendidikan yang mapan tersebut di harapkan dapat meningkatkan pola pikir yang kreatif, inovatif, kritis, produktif,serta memiliki sifat yang lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia banyak yang dapat dilakukan, diantaranya dengan mewajibkan kegiatan program pengalaman kerja lapangan bagi peserta didik/mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya.

Adanya kegiatan program pengalaman kerja lapangan yang di wajibkan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan di harapkan mahasiswa dapat berinteraksi atau terjun langsung dalam ruang lingkup pekerjaan yang berkaitan dengan jurusan studi yang di ambil.

Program pengalaman kerja lapangan ini, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah di pelajari di saat perkuliahan aktif dengan praktek di lapangan, serta dapat meningkatkan persepsi, wawasan, dan pola pikir mahasiswa.

Diharapkan dapat mengetahui dan mengerti kegiatan yang di lakukan oleh pengawai yang bekerja di tempat pengalaman program kerja lapangan. sebagai bekal untuk masuk kedalam ruang lingkup pekerjaan sebenarnya setelah menyelesaikan studinya.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memasukkan program pengalaman kerja lapangan menjadi salah satu mata kuliah pokok, khususnya D3 Manajemen Perpajakan yang berkerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak agar alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Lebih Berkopeten dalam bersaing di dunia kerja.

D3 Manajemen Perpajakan di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak Wilayah SUMUT I mendukung adanya program pengalaman kerja lapangan agar dapat menghasilkan generasi bangsa yang lebih profesional, memiliki integritas yang tinggi serta berbudi pekerti yang baik dan dapat di percaya

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Kerja Lapangan

Pelaksanan program pengalaman kerja lapangan ini di laksanakan penulis pada tanggal 1 februari 2017 sampai dengan 28 februari 2017 di KPP Pratama Medan Petisah yang beralamatkan dijalan Asrama No.7A dan dengan seluruh pegawai yang berkerja, serta mengikuti semua kegiatan operasional dan mengikuti standart operasional program, serta peraturan yang berlaku di KPP Pratama tersebut.

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan laporan program pengalaman kerja lapangan ini, yaitu :

- Ruang lingkup yang menjadi bahan penulisan adalah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah bagian-bagian atau seksi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah sesuai peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yaitu:
 - Sub bagian Umum
 - Tim Fungsional Pemeriksa Pajak
 - Seksi Pelayanan
 - Seksi Ekstensifikasi
 - Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - Seksi Pemeriksaan
 - Seksi Penagihan
 - Seksi Waskon I
 - Seksi Waskon II
 - Seksi Waskon III
 - Seksi Waskon IV

- penulis di tempatkan di seksi bagian penagihan.
- 2. Objek penelitian yang menjadi bahan penelitian pada pelaksanaan kegiatan dibagian penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang terkait dengan kegiatan melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo pembayaran.
- Rentang waktu data yang dilakukan penelitian adalah informasi penagihan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2017.

Dalam hal tangung jawab dan kegiatan, mahasiswa peserta magang di tugaskan membantu para pegawai di bagian mana peserta di tempatkan, di sini penulis di tempatkan pada bagian penagihan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mengecek Rekonsiliasi data tunggakan wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari program pengalaman kerja lapangan yang di laksanakan pada KPP Pratama Medan Petisah adalah :

- 1. Tujuan secara umum:
- a. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma III Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- b. Untuk mendidik dan melatih penulis agar mempunyai kemampuan dalam berfikir secara sistematis dan kritis agar dapat memecahkan permasalahan dan mendapatkan alternatif penyelesaian yang terbaik.
- 2. Tujuan secara khusus:
- a. Untuk meningkatkan motivasi kerja dikalangan mahasiswa.

- b. Untuk membangun sikap mental di dalam kerja nyata, yakni percaya diri, sadar akan kemampuan diri, pantang menyerah, mampu berkerja keras, disiplin, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko dengan perhitungan yang matang, berprilaku pemimpin, memiliki visi kedepannya, tanggap terhadap sasaran dan kritis, memiliki kemampuatan empati, dan keterampilan sosial.
- c. Untuk meningkatkan, memperluas, dan menetapkan pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
- d. Untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana dunia kerja yang sesungguhnya
- e. Untuk Sumber Daya Manusia yang memiliki dunia kerja yang profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan atas dasar yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- f. Untuk meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan kepatuhan tenaga kerja yang berkualitas.
- g. Untuk memberikan masukan sesuai dengan kempampuan penulis yang munkin berguna dalam penyelesaian masalah dalam Program Pengalaman Kerja Lapangan.
- h. Untuk dapat di gunakan dengan sebaiknya serta dapat menjadi bahan refrensi tambah ilmu khusunya di bidang perpajakan yaitu dibagian penagihan.

Manfaat dari pelaksanaan program pengalaman kerja lapangan ini adalah;

- Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft skill
- b. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat langsung dalam kegiatan nyata instansi guna mengasah kemampuan serta sikap profesional.

- c. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek kerja lapangan.
- d. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa dengan hal-hal yang belum di dapat di dalam perkuliahan.
- e. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep yang telah di pelajari di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan praktek langsung di KPP Pratama Medan Petisah.
- f. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penagihan perpajakan.
- g. Agar pembahasan yang penulis bahas ini dapat menjadi tambahan ilmu untuk dunia luar agar lebih mengerti tentang kegiatan penagihan.
- h. Memberikan gambaran umum tentang kegiatan penagihan dan penyuluhan kepada para pembaca.
- Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu di KPP Pratama
 Medan petisah khusunya bidang penagihan

BAB II

A. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah

a. Sejarah Umum KPP Pratama Medan Petisah

Kantor pelayanan pajak di kota medan dibentuk tahun 1989 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK.01/1989 tanggal 25 maret 1989 tentang organisasi dann tata usaha direktorat jendral pajak. Pada waktu di bentuk 2 (dua) kantor pelayanan pajak, yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 april 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1. KPP Medan Utara.
- 2. KPP Medan Timur.
- 3. KPP Medan Barat.

Kemudian dengan SK Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- 1. KPP Medan Utara.
- 2. KPP Medan Timur.
- 3. KPP Medan Barat

- 4. KPP Medan Barat.
- 5. KPP Medan Binjai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdomisili di jalan asrama No. 7A Medan. Pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Petisah meliputi pelayanan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta jenis-jenis pajak lainnya.

Wilayah kerjanya meliputi tiga kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Medan Petisah.
- b. Kecamatan Medan Helvetia.
- c. Kecamatan Medan Sunggal.

Wajib pajak yang berada dalam pelayanan dan pengawasan KPP Pratama Medan Petisah meliputi seluruh wajib pajak yang berdomisili pada tiga kecamatan tersebut, kecuali sejumlah wajib objak yang tertentu yang pelayanan dan pengawasannya menjadi tagung jawab KPP wajib pajak besar, KPP Madya dan KPP BUMN.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

- 1. KPP Medan Timur, berdommisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan.
- 2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- 3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- 4. KPP Medan Polonia, berdomosili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.

- 5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama no 7A Medan.
- 6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No1 Rambung Barat Binjai. Namun seiring waktu yang terus berjalan KPP Medan Belawan di pindah tempatkan di tempat lain sehingga KPP yang berdomisili di Jalan Asrama No. 7 A Medan terbagi atas 2 KPP Pratama:
 - 1. KPP Pratama Medan Petisah
 - 2. KPP Pratama Medan Barat

Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 535/KMK.01/2001 tentang "Koordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak". Telah di adakan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang di dalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian/intruksi, dan juga terbentuknya kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun ruang lingkup Wilayah Kerja dari KPP Pratama Medan Petisah meliputi :

- A. Waskon I yang wilayah kerjanya meliputi:
- 1. Sekip
- 2. Sei Sikambing C II
- 3. Sei Sikambing D
- 4. Sei Putih Tengah
- 5. Sei Putih Timur
- 6. Helvetia Timur
- B. Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi:
- 1. Petisah Tengah
- C. Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi:

- 1. Sunggal
- 2. Tanjung Rejo
- 3. Helvetia Tengah
- 4. Tanjung Gusta
- 5. Babura Sunggal
- 6. Kampung Lalang
- D. Waskon IV yang wilayah kerjanya:
- 1. Sei Putih Tengah
- 2. Sei Putih Timur II
- 3. Cinta Damai
- 4. Dwi Kora
- 5. Helvetia
- 6. Sei Sikambing B
- 7. Simpang Tanjung

KPP Pratama adalah intansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Visi dan Misi serta Logo instansi sebagai berikut:

KPP Pratama Medan Petisah dengan konsisten berusaha untuk melakukan tugas dan wewenangnya diwilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini tak terlepas dari Visi dan Misi yang di embannya berdasarkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

"Menjadi Instansi Pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi"

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

"Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien"

- c. Visi KPP Pratama Medan Petisah
- "Masyarakat memperoleh kepastian layanan."
- d. Misi KPP Pratama Medan Petisah
- "Melalui pelayanan yang dibanggakan terhimpun penerimaan pajak"

e. Logo Perusahaan

KPP Pratama Medan Petisah menggunakan Logo Direktorat Jenderal Pajak sebagai logo perusahaan, dikarenakan seluruh KPP Pratama berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun logo dari Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut:



Gambar. logo Direktorat Jendral Pajak

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Petisah

Arti dari lambang tersebut adalah:

1) Keterangan Umum

Motto

: Nagara Dana Rakca

Bentuk

: segilima, dengan ukuran 5cm dan 7cm

Tata Warna : Biru Kehitam-hitaman; kuning emas; putih dan hijau.

2) Makna

- a) Padi sebanyak 177 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlengkung 4 dan 4 buah berlengkung 5, berwarna putih dan kelopak berwarna hijau, keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia.
- b) Sayap berwarna kuning emas melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
- c) Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan negara.

d) Ruang segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

3) Arti Keseluruhan

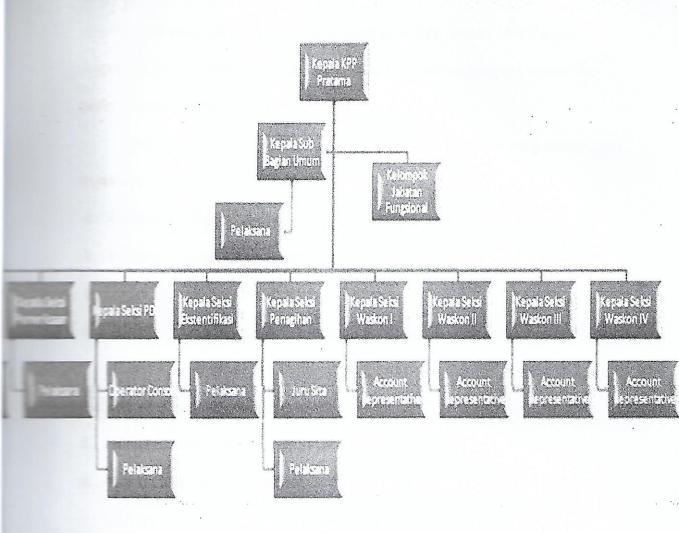
Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto "Nagara Dana Rakea" adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Departemen Keuangan.

B. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan seelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.55/PMK.01/2007, Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGAISASI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH



Gambar. Struktur Organisasi

C. Bidang-bidang dan Deskripsi Kerja KPP Pratama Medan Petisah1.Sub Bagian Umum (Sub Bag.Umum)

Sub bagian umun mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepagawaian, Keuangan Rumah Tangga dan bertugas menangan i urusan dan perlengkapan Rumah Tangga

Sub bagian umum terdiri dari Sub umum dan pelaksanan yang mempunyai tugas terdiri dari:

- a. Penerimaan Dokumen di KPP
- b. Pemerosesan dan Penata usahaan Dokumen masuk di Sub Bagian Umum
- c. Penyampaian Dokumen di KPP
- d. Pelaksanaan pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- e. Permintaan Pengujian Kesehatah Pegawai
- f. Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa
- g. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan
- h. Pemusnahan dokumen, penyusunan laporan berkala KPP dan pembuatan laporan tahunan
- i. Penyusunan laporan/daftar Realisasi Anggaran Belanja

1) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja

sama perpajakan. Seksi pelayanan mempunyai prosedur standar kerja sebagai berikut :

- Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pajak pada Tempat Pelayan
 Terpadu (TPT)
- Penyelesaian pemindahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lama dan baru
- c. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- d. Pendaftaran dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
 Tahunan PP
- f. Penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT tahunan PPh
- g. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi dan lain-lain

2) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai prosedur standar kerja, tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumendokumen penagihan.

- a. Pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan
- b. Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya
- c. Penyelesaian usulan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- d. Penerbitan STP Bunga Penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita.

3) Seksi Pemeriksaaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Seksi pemeriksaan mempunyai prosedur standar kerja sebagai berikut:

- a. Penyelesaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar
- Penyelesaian permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 Penjualan Barang Mewah
- c. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Perhitungan
- d. Pengamata KPP, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan, dan penyelesaian Usulan Pemeriksaan dan lain-lain.

4) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemukhtahiran basis data nilai objek pajak. Adapun prosedur standar kerja Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun lapangan
- Penerbitan Surat Himbauan untuk ber NPWP
- Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan Monografi Fiskal
- Penyelesaian Permohonan Penundaan Pengembalian SPOP dan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB
- e Penerbitan daftar norminatif untuk usulan SP3 SPL Ekstensifikasi dan lain-

5) Seksi Pengelolahan Data dan Informasi

Seksi Pengelolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan, urusan pengelolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak. Adapun prosedur standar kerja Seksi Pengelolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut;

- a. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan
- b. Pemprosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi PDI
- c. Pembuatan dan penyampaian Surat Perhitungan dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain
- d. Pembentukan dan pemanfaatan Bank Data dan lain-lain.

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, II, IV (Waskon I, II, III, IV)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan Konsultasi Teknis Perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan usulan pembetulan ketetapan pajak. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai prosedur standar kerja sebagai berikut:

- Penyelesaian permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha, atau pemekaran usaha
- Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat
 Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)

- c. Penyelesaian permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP
- d. Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- e. Pembuatan Surat Pemberitahuan perubahan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (Dinamisasi) dan lain-lain. Pada KPP Pratama Medan Petisah terdapat 4 seksi Pengawasan dan Konsultasi di dalam organisasi KPP Pratama Medan Petisah dikenal adanya *Accounting Representatif* (AR) yang bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP, atau Kepala Karikpa yang bersangkutan.

2. Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan

a. Jenis dan Bentuk Program Pengalaman Kerja Lapangan

Berdasarkan persetujuan dari KPP Pratama Medan Petisah, maka penulis melaksanakan PPKL yang terhitung mulai dari tanggal 1 februari sampai dengan 28 februari 2017, sedangkan hari jam kerja di KPP Pratama Medan Petisah tersebut dan waktu kegiatan yang disediakan kepada penulis selama berada di KPP Pratama Medan Petisah adalah sama dengan waktu kerja para pegawai yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB.

Pelaksanaan Program Pengalaman Kerja Lapangan yang kami lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Patisah, memberikan hasil dan temuan yang dapat kami ambil dan kami pelajari selama PPKL berlangsung.

Pelaksanaan prosedur kegiatan kerja Program Pengalaman Kerja Lapangan, kami harus mengikuti segala peraturan – peraturan yang berlaku atau telah di tetapkan di KPP Pratama Medan Petisah, seperti halnya pegawai – pegawai yang lainnya.

Kami yang mengikuti PPKL di KPP Pratama Medan Petisah berjumlah 5 orang dan di tempatkan pada masing-masing bagian yang di tentukan oleh Sub Umum tanpa ada rotasi pemindahan ke seksi yang lain.

Para peserta PPKL harus melaksanakan peraturan – peraturan yang berlaku, yang wajib untuk dipatuhi selama jam kerja berlangsung , peraturan tersebut adalah :

- Hadir setiap hari dan menandatangi daftar hadir selambat-lambatnya pukul
 07.30 WIB dan pulang kerja pukul 17.00 WIB
- Menggunakan pakaian sesuai peraturan kantor yaitu: senin memakai pakaian putih hitam, selasa menggunakan baju batik, rabu menggunakan pakaian putih hitam, kamis menggunakan pakaian putih hitam, jum'at menggunakan baju batik.

- 3. Ketika jam pulang kerja hendaklah meminta izin kepada kepala seksi dan AR beserta pegawai lain yang berada di ruangan.
- 4. Apabila tidak dapat hadir atau harus meninggalkan kantor saat jam kerja berlangsung, hendaknya izin terlebih dahulu kepada pegawai yang ada di ruangan.
- Apabila bertemu dengan seluruh staf dan karyawan hendaklah bertegur sapa atau tersenyum

Selama melaksanakan Program Pengalaman Kerja Lapangan ada beberapa bentuk jenis kegiatan tempat maupun unit kerja dan peraturan yang berlaku di setiap seksi bagian-bagian yang di masuki, Mulai dari tanggal 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2017 di tempatkan pada seksi bagian pengihan.

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1. Mengecek data wajib pajak yang terutang.
- Melakukan pengecekan berskala terhadap data wajib pajak yang terutang.
- 3. Menyusun dan merapikan berkas wajib pajak yang terutang.
- Menulis dan mengantarkan surat masuk dan keluar terhadap wajip pajak terutang.
- Membantu mengerjakan pemeriksaan kelengkapan berkas wajib pajak terutang.

b. Prosedur Kerja

bagian penagihan.

Adapun prosedur yang dilakukan adalah:

 Penulis Mengambil berkas ke gudang setelah itu penulis memberikan kepada seksi penagihan untuk di periksa berkas wajip pajak yang terutang, setelah

- berkas selesai di periksa oleh seksi penagihan penulis kembali lagi memasukan berkas ke dalam gudang dan penulis harus menyusun dengan rapi di dalam gudang.
- 2. Penulis di sarankan untuk mengechek data wajip pajak yang terutang di dalam komputer melalui aplikasi yang telah di sediakan oleh seksi pnagihan,setelah itu penulis menandai wajip pajak terutang dengan tanda warna merah supaya seksi penagihan tahu yang mana wajip pajak yang sudah data nya di chek,dan belum di chek dengan adanya tanda warna merah.
- Setelah berkas wajib pajak terutang selesai di chek berkas nya penulis kembali kedalam gudang membawa berkas wajip pajak terutang untuk di susun kembali seperti semula.
- 4. Penulis mengetik surat edaran yang telah jatuh tempo terhadap wajib pajak melalui komputer yang telah di sediakan oleh seksi penagihan, setelah mengetik surat edaran, penulis langsung ngeprint dan mengambil surat edaran untuk di berikan kepada kepala bagian penagihan untuk di tanda tangani lalu diberikan kepada bagian seksi penagihan.
- 5. Penulis mengmbil berkas wajip pajak terutang kegudang,setelah itu diberikan kepada seksi penagihan, untuk di chek berkasnya setelah di chek oleh seksi penagihan,penulis di suruh untuk memberikan kepada kepala bagian penagihan untuk di tanda tangani setelah itu penulis di sarankan untuk menyusun nya kembali kedalam gudang yang telah di sediakan.

C. Kendala Kerja dan Pemecahan masalah.

1.Kendala Kerja

Selama melaksanakan Program Pengalaman Kerja Lapangan di KPP Pratama Medan Petisah ada beberapa kendala yang penulis hadapi dalam melaksankan kegiatannya, di karenakan penulis baru pertama kalinya mengikuti Program Pengalaman Kerja Lapangan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi penulis diantaranya:

- Penulis butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
- b. Penulis tidak mengetahui dengan baik bagian apa yang ada di seksi penagihan dan tidak memahami Kegiatan dan Tugas – Tugas Seksi penagihan tempat penulis di tempatkan.

2. Pemecahan masalah

Dan dengan kendala-kendala yang penulis alami penulis harus mengetahui pemecahan masalah yang terjadi pada diri penulis sebagai kekurangan dari penulis, pemecahan masalah yang penulis lakukan adalah:

- tentang beradaptasi dengan lingkungan yang baru, penulis harus memperkenalkan diri penulis kepada para pegawai, penulis harus bersikap ramah dan sopan serta tidak sombong, dan bersedia membantu para pegawai jika di butuhkan.
- b. Tentang kendala penulis tidak tahu dengan baik bagian apa yang ada di seksi bagian penagihan dan apa tugas yang ada di seksi penagihan penulis menyelesaikannya dengan cara bertanya kepada salah satu karyawan dan penulis harus kritis dan sering bertanya kepada pegawai tentang hal-hal yang tidak penulis ketahui dan tidak penulis pahami tentang pekerjaan yang

B. PEMBAHASAN

"Penagihan Wajib Pajak Yang Terutang KPP Pratama Medan Petisah a. Pengertian pajak

Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah iuran kepada negara yang terhitung oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi (balas jasa) kembali yang langsung.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeth, pajak adalah prestasi pemerintah yang terhitung melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksan. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan istilah wajib pajak mengandung pengertian bahwa wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan.

b.Pengertian penagihan pajak

Adapun yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

c. Jenis-jenis penagihan pajak

Dua jenis penagihan pajak:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan

yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang

d. Tahapan penagihan pajak

Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam.

Adapaun ciri-ciri surat paksa, yaitu

 Surat paksa berkepala (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam pengadilan perdata (parade Eksekusi).
- 3. Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah.
- 4. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat dan juru sita pajak daerah Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyendraan.

Sifat-sifat surat paksa, yaitu

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse atau salinan putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding kepada hakim atasan.
- 2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- 3. Mempunyai fungsi ganda:
 - a. Menagih utang pajak termasuk (pokok pajak, denda dan kenaikan)
 - b. Menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
 - c. Surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan dan penyenderaan.

4. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat dilakukan tindakan penyitan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

e. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum di maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

E Dasar penagihan pajak

Dasar penagihan pajak, antara lain:

Pasal 18 UU KUP, yaitu:

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayarbertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 19 UU KUP, yaitu:

Adapun penjelasan hal diatas yaitu:

- Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Pasal 1 point 19)
- 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besama sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15)
- 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 point 16)
- 4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Surat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar,

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.(Pasal 1

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(Pasal 1 point 30)

- Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding berhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 31)
- Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayarbertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (b) Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).
- (3) Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (3) huruf b dan c, sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 20 UU KUP, yaitu:

- (1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SKPembetulan, SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (3) atau (3a), dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:
 - Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu.

- b. Penaggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalitan
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 21 UU KUP, yaitu:

- Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak."
- (3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :
 - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergeerak dan ataau barang tidak bergerak.
 - Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan

- c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembeulan, SKKeberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah."
- (5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud diatas dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa, atau
 - b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pemmbayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Pasal 22 UU KUP, yaitu:

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, kadarluwasa, setelah melampaui waktu 5 (tahun) terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembetulan, SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.

- c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (5), SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (4), atau
- d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

Pasal 23 UU KUP, yaitu:

- (1) Dihapus.
- (2) Gugatan WP atau penanggung pajak terhadap:
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakn Penyitaan, atau
 Pengumuman Lelang.
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 (1) dan 26, atau
 - d. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan."

(3) dihapus.

Pasal 24 UU KUP, yaitu:

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Bunga penagihan pajak

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

- · Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang
- · Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan

jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan Surat.

Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempat tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan. Untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15).

g. Biaya penagihan pajak

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaa surat paska, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian dan biaya penagihan lainnya yang beruhubungan dengan penagihan pajak.

h. Kadaluwarsa tindakan penagihan pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, kadaluwarsa setelah lampau waktu 10tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tangal penyampaian surat paksa tersebut.
- Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
- b. Adanya permohonan keberatan. Untuk kadaluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk kadaluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut

i. Jadwal waktu penagihan

- 1. Surat Peringatan atau teguran 7 hari setelah jatuh tempo
- 2. Surat paksa 21 hari setelah peringatan atau teguran
- 3. Penyitaan (2x24 jam) setelah surat paksa
- 4. Pengumuman lelang, 14 hari setelah sita
- 5. Lelang 14 hari setelah pengumuman lelang.

j. Penagihan pajak seketika dan sekaligus

- 1. Terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak.
- Untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terulang tidak dapat ditagih.
- Agar penerimaan negara disektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat.

Daftar kerja seksi penagihan KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

1. Penatausahaan surat-surat lain untuk seksi Penagihan

- a. seksi penagihan menerima surat yang sudah didisposisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, meneliti dan memberi disposisi serta meneruskannya kepada pelaksana.
- b. Pelaksanaan mengagendakan surat tersebut, membuat konsep Surat Jawaban, atau merekam, atau menindaklanjuti dengan kegiatan lainnya sesuai disposisi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- c. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf konsep Surat Jawaban dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Jawaban kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk menindaklanjuti.
- e. Kepala Seksi Penagihan menugaskan pelaksana untuk penomoran dan mengirimkan Surat Jawaban melalui Subbagian Umum.
- f. Pelaksana memberi nomer dan mengirimkan Surat Jawaban melalui Subbagian Umum.
- 2. Pembuatan Laporan Kantor Wilayah
- a. Kasi Penagihan memerintahkan pelaksana Seksi Penagihan agar membuat laporan bulanan, triwulanan ataupun laporan *insidentil* apabila diminta kanwil DJP.
- b. Pelaksana Seksi Penagihan membuat laporan-laporan. Apabila laporan yang diminta berupa laporan yang sifatnya insidentil, maka format laporan disesuaikan dengan surat permintaan laporan tersebut, apabila laporan berupa laporan rutin, maka bentuk laporan mengacu pada surat Direktur Pemeriksaan,

- Penyelidikan dan Penagihan Pajak No. S-67/PJ.75/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang penyampaian laporan penagihan.
- c. Kepala Seksi Penagihan akan meneliti laporan, apabila laporan disetujui kemudian memberi paraf, dan menyerahkannya ke Kepala Kantor untuk ditandatangani. Apabila tidak setuju, maka laporan dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki.
- d. Kepala Kantor menandatangani laporan beserta surat pengantarnya.
- e. Pelaksana Seksi Penagihan akan mengirimkan laporan melalui Subbagian Umum dan mengarsip salinannya.
- Penatausahaan surat keputusan keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi.
- a. Pelaksana menerima, meneliti dan menandatangani daftar pengantar surat keputusan pembetulan, surat pelaksanaan keputusan keberatan/putusan banding beserta keputusannya, surat pelaksanaan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi beserta keputusannya dari Seksi Pelayanan.
- b. Pelaksana mencatat dalam buku masuk surat dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan untuk mendapatkan disposisi.
- c. Pelaksana mentatausahakan daftar pengantar dalam berkas daftar pengantar.
- d. Pelaksana melakukan aplikasi adminitrasi pada SI DJP menu pelunasan tunggakan untuk keputusan yang diterima seluruhnya atau sebagian.
- e. Pelaksana mengisi kartu tunggakan untuk keputusan yang diterima seluruhnya/sebagian atau keputusan yang menambah jumlah pajak terutang.

- f. Pelaksana mentatausahakan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan/putusan banding, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi, dengan menempelkan pada surat ketetapan pajak yang bersangkutan.
- 4. Penatausahaan SKP/STP/SSP/STTS/PBk

- a. Pelaksana menerima, meneliti dan menandatangani daftar pengantar SKP/STP/STB beserta ketetapannya dari Seksi Pelayanan.
- b. Pelaksana menerima, meneliti dan menandatangani daftar pengantar surat setoran pembayaran pajak (SSP) lembar ke-2 dan STTS dari Seksi Pengolahan Data Informsai.
- c. Pelaksana menerima, meneliti dan menandatangani daftar pengantar surat setoran pembayaran pajak (SSP) lembar ke-3 dari Seksi Pengolahan Data Informasi.
- d. Pelaksana menerima, meneliti dan menandatangani daftar pengantar surat-surat bukti Pbk dari Seksi Pelayanan.
- e. Pelaksana mentatausahakan daftar pengantar dalam berkas daftar pengantar.
- f. Pelaksana mentatausahakan surat ketetapan pajak/STP/STB dalam berkas penagihan berdasarkan jenis pajak, per tahun pajak per tahun terbit.
- g. Mencatat pada kartu penagihan baik SKP/STP maupun bukti pelunasannya (SSP).

- h. Pelaksana mentatausahakan surat setoran pembayaran pajak (SSP/STTS) dalam berkas penagihan wajib pajak dengan menempelkan pada surat ketetapan pajak/STP/STB yang bersangkutan pada berkas penagihan (ordner).
- 5. Penerbitan surat permintaan pemblokiran rekening wajib pajak kepada pimpinan bank.

- a. Jurusita pajak negara memeriksa kelengkapan dokumen penagihan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak/SK. Keberatan SK. Putusan pelaksanaan banding, Surat Teguranmdan Surat Paksa dan membuat salinannya serta dilegalisir oleh Kepala Seksi Penagihan.
- b. Jurusita pajak negara membuat dan mencetak permohonan pemblokiran harta kekayaan wain pajak/penanggung pajak yang tersimpan pada bank.
- c. Kepala Seksi Penagihan memeriksa dan menyetujui surat permohonan pemblokiran harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak yang tersimpan pada bak
- d. Surat permohonan pemblokiran harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak yang tersimpan pada bank dikirim ke Kepala Kantor untuk ditandatangani.
- e. Proses selesai, surat permohonan pemblokiran harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak yang tersimpan pada bank disampaikan kepada pimpinan bank disertai dengan salinan SKPKB/STP/SK.Keb/SK. Banding, Surat Teguran, Surat Paksa yang dilegalisir dan Asli Surat Perintah melakukan Penyitaan.

6. Pembuatan usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.

Cara kerjanya:

- a. Jurusita pajak negara memeriksa kelengkapan dokumen penagihan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak/SK. Keberatan/SK. Putusan pelaksanaan Banding, Surat Teguran dan Surat Paksa dan membuat salinannya serta dilegalisir oleh Kepala Seksi Penagihan.
- b. Jurusita pajak negara juga memeriksa kelengkapan dokumen dari identitas penanggung pajak/ Wajib Pajak diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Paspor, serta kartu identitas lainnya yang dimiliki oleh penanggung pajak/ wajib pajak. Selain itu jurusita pajak negara juga membuat uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknyadalam pelunasan utang pajak.
- c. Jurusita pajak negara membuat dan mencetak surat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- d. Kepala Seksi Penagihan memeriksa dan menyutujui surat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu.
- e. Surat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu dikirim ke Kepala Kantor untuk ditandatangani.
- f. Surat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu disampaikan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.
- 7. Penghapusan piutang pajak.

- a. Membuat daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin di tagih lagi.
- b. Mengecek daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan menyampaikan kepada kepala kantor untuk mendapatkan persetujuan melalui Kepala Seksi Penagihan.
- c. Meneliti ketikan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak dapat ditagih lagi dan meneruskan kepada kepala kantor pelayanan untuk ditanda tangani melalui Kepala Seksi Penagihan.
- d. Menyampaikan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi kepada jurusita untuk piutang pajak yang perlu dilakukan penelitian setempat dan penelitian admninitrasi.
- e. Membuat kutipan buku register usulan penghapusan piutang pajak beserta konsep pengantar untuk dikirim ke Kantor Wilayah.
- f. Membuat daftar usulan penghapusan piutng pajak berdasarkan petikan buku register yang sudah diteliti Kantor Wilayah DJP dalam rangkap 6 (2 dengan logo, 4 tanpa logo).
- g. Menerima,mengecek daftar usulan penghapusan piutang pajak dan menyampaikan kepada kantor pelayanan untuk disetujui melalui Kasi Penagihan dan mengirimkankepada Kepala Kanwil DJP melalui Subbagian Umum.
- h. Mencatat salinan surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan piutang pajak ke dalam buku agenda surat masuk dan diteruskan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan disposisi.

- Meneliti surat keputusan menteri keuangan tentang penghapusan piutang pajak sebelum dilakukan aplikasi adminitrasi di SI DJP dengan daftar usulan yang telah dilakukan sebelumnya untuk tahun tersebut.
- j. Melakukan aplikasi di SI DJP terhadap ketetapan yang terdapat di Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, sehinggu atas tunggakan tersebut terlunaskan.
- k. Membuat petikan salinan surat keputusan menteri keuangan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk disetujui melalui Kepala Seksi Penagihan.
- Membuat daftar pengantar keputusan penghapusandan disampaikan kepada kepala seksi untuk ditanda tangani.
- m. Mencatat daftar pengantar pengahapusan piutang pajak beserta petikan surat keputusan Menteri Keuangan dan mengirimkan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan buku ekspedisi untuk diteruskan kepada AR yang bersangkutan.
- n. Mentatausahakan petikan salinan keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai arsip.
- 8. Menerbitkan surat teguran penagihan

- a. Sistem secara otomatis membangkitkan masalah teguran atas keterlambatan pembayaran tunggakan pajak.
- b. Sistem secara otomatis membangkitkan produk hukum teguran untuk kasus yang dipilih.
- c. Pelaksana Seksi Penagihan melakukan pencetakan Surat Teguran Penagihan.

- d. Surat Teguran Penagihan dikirim ke Kepala Kantor unutk ditanda tangani.
- e. Proses selesai, Surat Teguuran dikirim oleh Subbagian Umum kepada Wajib Pajak.
- 9. Menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan

- a. Sistem secara otomatis membangkitkan SPMP yang akan diterbitkan.
- Kepala Seksi Penagihan memberikan persetujuan terhadap SPMP yang akan diterbitkan.
- c. Dalam hal Kepala Seksi Pengihan tidak menyetujui penerbitan SPMP, juru sita merekam data bahwa SPMP tidak jadi di terbitkan dan kasus ditutup.
- d. Kepala Kantor memberikan persetujuan atas SPMP yang akan diterbitkan.
- e. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui penerbitan SPMP, juru sita merekam data bahwa SPMP tidak jadi diterbitkan dan kasus ditutup.
- f. Juru sita mencetak SPMP yang sudah disetujui dan mencetak formulir berita acara pelaksanaan sita.
- g. SPMP yang sudah dicetak dikirim kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani.
- Setelah melakukan penyitaan, juru sita merekam berita acara pelaksanaan sita,
 proses selesai.
- 10. Pelaksanaan lelang

Cara kerjanya:

a. Juru sita pajak menginventarisasi penunggakan pajak yang akan dilelang, meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan (SSP/STTS/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi admintrasi), membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

- b. Kepala Seksi Penagihan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- d. Kepala Seksi Penagihan menerima Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada juru sita pajak.
- e. Juru sita pajak menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
- f. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara membuat Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dan mengirimkannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang kepada Kepala Seksi Penagihan.
- h. Juru sita pajak membuat konsep Pengumuman Lelang dengan tanggal/hari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal/hari berdasarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

- Kepala Seksi penagihan menyetujui dan memaraf konsep Pengumuman
 Lelang, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- j. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani Pengumuman Lelang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- k. Kepala Seksi Penagihan menerima Pengumuman Lelang yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Juru sita pajak.
- Juru sita pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbit Surat Kabar Harian untuk diiklankan atau ditempel di papan pengumuman kantor dalam hal Pengumuman Lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pengumuman Lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- m. Juru sita pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir sebelum tanggal/hari Pelaksanaan Lelang dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
- n. Kepala Seksi Penagihan meneliti, menyetujui dam memaraf konsep Surat Kesempatan Terakhir, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- o. Kepala Kantor Pelayanan pajak meneliti, menyetujui dam menandatangani Surat Kesempatan Terakhir dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
- p. Kepala Seksi Penagihan menerima Surat Kesempatan Terakhir yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Juru sita pajak.

- q. Juru sita pajak mengirimkan Surat Kesempatan Terakhir kepada Penanggung Pajak.
- r. Pelaksanaan Lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi Penagihan sebagai Penjual Barang Sitaan.
- s. Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- t. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara membuat Risalah Lelang dan mengirimnya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- u. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan Risalah Lelang kepada Kepala Seksi Penagihan.
- v. Juru sita pajak mentatausahakan Risalah Lelang ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penagihan pajak penulis menyimpulkan Penagihan pajak adalah tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita semua itu dilakukan berdasarkan uu yang telah di atur dalam dektorat jendal pajak,dan tidak bisa di ubah lagi jadi setiap wajib pajak harus melunasi sebelum jatuh tempo atau sebelum di berikan surat teguran.

B. SARAN

Beberapa saran dari penulis terhadap pengembangan dari pembahasan adalah:

- Upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya khususnya wajib pajak yang telah menunggak pajak nya atau pajak yang belum di lunasi,segera untuk mengurus nya sebelum pajak nya habis tempo.
- seksi bidang penagihan harus lebih berkerja keras dalam memberikan penyuluhan dan informasi terbaru tentang peraturan dan kebijakan-kebijakan terbaru direktorat jendral pajak.
- 3. Dengan wilayah kerja yang luas juga di perlukan adanya pembagian tugas, pembagian wilayah kerja di antara tim Seksi penagihan dengan begitu lebih mempermudah proses kegiatan penagihan di KPP Pratama Medan Petisah

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo.(1995). Perpajakan Edisi 3, Penerbit Andi: Yogyakarta.

S.Munawir.(1985). Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty. Yogyakarta.

Soemitro, Rochmat.(1974). Pajak dan pembangunan, PT. Eresco. Bandung.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

: DONI SYAHPUTRA Nama

Tempat dan Tanggal Lahir : Rundeng.18-05-1995

: laki-laki Jenis Kelamin

: Islam Agama

: Indonesia Kewarganegaraan

: Dsn.psr Rundeng,kec,Rundeng,Kota Subulussalam. Alamat

: 4 dari 5 bersaudara Anak Ke-

Nama Orang Tua

: JAMIL MUNTHE Nama Ayah

: MARIAH KOMBIH Nama Ibu

: Jln,Rundeng,kec,rundeng Alamat

Pendidikan Formal

2001 - 2006 1. MIN 01 RUNDENG

2007 - 2009 2. SMP N 1 RUNDENG

2010 - 20133. SMAN1RUNDENG

4. Tahun 2014 – 2017 tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan,

Maret 2017

DONI SYAHPUTRA

NPM: 1405190023

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PROGRAM PPKL MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPKL

NAMA

: DONI SYAHPUTRA

NPM

: 1405190023

TEMPAT PPKL

: KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1 .	Sistematis/Teknis Penulisan (St)	86	
2	Uraian/deskripsi (Ds)	86	
3	Pembehasan/Aanalisis dan kesimpulan (PPk)	87	

Medan, Maret 2017

Dosen Pembimbing,

Hj. HAFSAH SE.M.Si

PROGRAM PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN D-III MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

LEMBAR PENILAIAN

NAMA

: DONI SYAHPUTRA

NPM

: 1405190023

TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

ASPEK YANG DI NILAI	NILAI (10 – 100)	RATA – RATA	KETERANGAN
Kompetensi Profesional			
a. Pelayanan			
 b. Seksi Sekretaris 			
c. Seksi Waskon I			
d. Seksi Waskon II			
e. Seksi Waskon III			
f. Seksi Waskon IV			
g. Seksi PDI			
h. Seksi Ekstensifikasi			
(i) Seksi Penagihan	99		*
j. Seksi Pemeriksaan			
k. dll	12		
Kompetensi Personal	93		
 a. Kedewasaan/Kematangan 	93		
Berfikir & bertindak			
 b. Tanggung Jawab 	94		
 c. Kejujuran 	95		
d. Kemandirian Sikap	93	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	
e. Disiplin	95		
f. Antusiasme Kerja	94		
 g. Atensi Terhadap Pekerjaan 	7.5		
Kompetensi Sosial	95		
 Intensitas Komunikasi 	93	S. Contraction of the Contractio	
b. Kerja sama			and the second s

Maret 2017 Medan, P Pratama Medan Petisah

PROGRAM PPKL MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

DAFTAR HADIR

NAMA

: DONI SYAHPUTRA

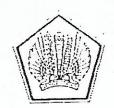
NPM

: 1405190023

TEMPAT PPKL

: KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

				Pagi		Siang					
NO	Hari/Tanggal	Masuk		uk Keluar		M	Masuk		Keluar		
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf	Jam	Paraf		
1.	Rabu / 1-02-2017	930		10.00		4.00		17-00			
2.	Kamis/2-02-2017	07-30		19-00		14.00		17-00			
3.	Jum'at/3-02-2017	07-30		19.00		14-00		17.00			
4.	Senin /6-02-2017	07-30		19-00		1400		17.00			
5.	Selasa/7-02-2017	07-30		12-00		14-00		17-00			
6.	Rabu /8-02-2017	57.31		12:00		101.00		17-00			
7.	Kamis/9-02-2017	07.30		12-00		14.00		17-10			
8.	Jum'at/10-02-2017	01.30		12-00		1400		17.00			
9.	Senin /13-02-2017	07.30		12.00		1400		17:00			
10.	Selasa/14-02-2017	07.20		1200		14.00		17.00		336	
11.	Rabu /15-02-2017			UK	(LASWA	laL.				
12.	Kamis/16-02-2017	01-40		1200		14.00		1709			
13.	Jum'at/17-02-2017	107.30		12-00		1400		17-00			
14.	Senin /20-02-2017	01.30		12.00		140		17-00			
15.	Selasa/21-02-2017	07-35		12-00		14.06		17-00			
16.	Rabu /22-02-2017	51.30		57.50		4-00		17-00			
17.	Kamis/23-02-2017	67.30		1200		14.00		7.10			
18.	Jum'at/24-02-2017	07.30		[2.60		1400		1700			
19.	Senin /27-02-2017	07.20		12.00		14-00		17-10			
20.	Selasa/28-02-2017	07.30		12.00		1900		17-to			



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

R ASBARMANO A Metro complex

THE POSTORE SECTOR THROUGH FOR THE STATISTICS WAS FORE JUST LAYADAD BY CEMAN DAILY CONTRACTOR FROM PARK TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF T

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN NOMOR SIT-(

Oleh karena Wajib Pajak Nama Wajib Pajak N P W P Alamat / tempat linggal			
dengan Penanggung Pajak sebaga	e bërikut		
No NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Alamattempat Pajak Inggal		Keterangan
1			
	and a Surat Polisia		
terah dilakukan penagihan pajak de	Halita Ottoria Comment		
Mornor	fangger	i	
542.	194 April 2014		
SPACE TO A SECOND SPACE OF THE	04 April 2014	:	
SP-0-0	04 April 2014	1	
SP4	04 April 2014		
SP-0 - 3	04 April 2014	i	
SP-C	04 April 2014		
SP -	64 April 2014	1	
Sp	04 April 2014		2

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diobah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penaginan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintat kan

kepada Nama

MP

Jabatan

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) untik Wajib. Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib. Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar ditakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi. Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyitaan

Kepala Kantor,

15 MMAN 196801231998031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILÂYAH DJP SUMATERA UTARA I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA NOMOR: LAP-5

1	Nama Wajib Paja	d. Penanggung Pajak
	SPWP	
	Alamat	

11. Pelaksanaan:

- Penyerahan Sahnan Surat Paksa, dilaksanakan pada tanggal, Oz Desember 2016
- Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
- Utang pajak sebagai berikut

No	Jeuis Papik	Tahun Pajak	Nomer STPSKFKH SKPKH I SK Pembendan SK Keberaran Putusan Haming	Junikih Pajak yang Masih Harus Pibas ar	Jumlah Pajak None Telah Jump Meausat Nutat Paksa	huniah Papak Lefah Lefah Memurot Wajib Pajak	Jumlah Pajak yang Masih Hanus Dibasan Menunut Surat Paksan	Pajak yang Masah Harus Dibay a Menorat Wanb Pajak
- 11	PPh Pasal 25/29	2011	\$1.450 CL	2	, i	i.r		1 ,
	Hadan PPN Hafam Negeri	- Junes	F		11		•	i

Data mengenal tanggakan pajak dan objek alia Wajin Pajak Penanggung Pajak

N. T	Jenes Pajak	Lahun Patak	STP SKPKB SKPKB	Langgal STP SKPER SK PERITSE Penits	(paggal Nara)	Penyelesanai Sarat Keberaton Journal	Penyelesman Sarat Keberatan Hatainar Daal d	Penyelesatan Surat Keberata Tanggakan
1			Keberatan Putusan	tulan/SK Keberat	Kebelatah	4		Pajai.
			Kinting	an Palusan Banding				İ
1 1	PPh Pasal 25-29	2011		In Oktober 2013				;
2 !	PPN Dalam Negen	2000	j ³					•
1								

	n	Objek Sita	21 STACK STORY CONTROL OF THE STACK STACK STORY CONTROL OF THE STACK STACK STORY CONTROL OF THE STACK STA
No	Katego	n Asset	Jenis Barang
i -			1 -

Lokasi Barang	Harga Barang

IV Kesan dan Usul Jurusita Pajak:

Satura Sara Paksa dirangal pala papan pengamanan SPR Banana Matar Beliah Larem WP talah dirandkan jeda atawa Sara Paksa WP ana Mammenyampaikan SPI Jahunan PPn tahun 2007.

Mengetahui Manal San Penguiban W 50121512161996021002 Medan, 15 Desember 2016 turusna Pajak

TONNI TOYNEL AMBARITA NIP 198609223006021005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA * DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Dutament Daily value as	emilih tempat kedudukan di KAN Pajak pada KANTOR PELAYANA!	, Tahun atas p FOR PELAYANAN PAJAK PRATAM NPAJAK PRATAMA MEDAN PETISA	A MEDAN PERIORIT
	MEMBERITAHU	KAN DENGAN RESMI	
puluh empat jaun, meme hiaya penagihan pajak in	urat Paksa tersebut memerintahkan nuhi isi Surat Paksa dan oleh kare sehanyak si dan hiaya selanjutnya, dan iika ia pa barang bergerak maupan barang si sil penjualannya digunakan untuk	ai diehatEnya ini turangg d kepada Penanggung Pajak supaya dalai ma itu harus menyetor ke Bank Persep dengan tidak mengarangi kewajib i tidak membuar dalam waktu yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimu membayar hutang pajak, denda, bung	an untuk membinyai biaya ah ditentukan, maka hari ka umum/dijual langsun
Surat Paksa mi dapat dila	njutkan dengan tindakan PENCEGA	HAN dan PENYANDERAAN.	
tempat tinggai / keduduk:	in orang pribadi : badan yang menan		
Penyerahan salinan Surat	Paksa ini dilakukan kepada	kun	bertempat tinggal t
Yang menerima salinan S	Surat Paksa	Jurusita Pajak	
		Though.	
Jahanan	trata 11122 ti	70001 TOYNOE AM	1111111:12
Diaya pelaksanaan Surat Biaya Harian Jurusita Biaya Perjalanan Jumlah	Pales selragai builest Rp		



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK · KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

STIRLY PAKSA

Nomor: * 增速

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimban	g bahwa :								
Nama Waj	ib Pajak/								
Penanggun	g Pajak								
NPWP		:	•	•				-	
Alamat		:			Ē	•	•		

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	, Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STP:SKPKB/SKPKBT SK.Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan	Tanggal jatuh Tempo pembayaran	Jumlah tunggakan p
	PPh Pasal 25/29 Badan	2011	- 16-	15/11/2013	1.000.00
2	PPN Dalam Negeri	2006	JUL-06	09/08/2006	100.00

Jumlah Rp. 1.100.08

(satu juta seraius ribu rupiah)

Dengan ini:

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / K Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat
- 2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanj pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir 1 di atas tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI SESUDAH BATAS WAKTU INI, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. (Pasal 12 Ayat I UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diuhah dengan UU Nomor 19 tahun 2000)

S.5.0.23.06

Ditetapkan di MEDAN Pada tanggal 02 Februari 2016 Kepala Kantor

Fahmi NIP 19680227199503100



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JL ASRAMA NO.7 A, Medan -, Kotak Pos -TELEPON (061)-8467935

FARSIMILE (161-8467744; SITUS LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200 EMAIL pengaduangipajak go id

Yth. Direktur Nama NPWP

Alamat

SURAT TEGURAN

NOMOR ST-

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut:

30bagai boiiii	555 51			
Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK.Keberatan/ Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali*)	Tanggal jatuh tempo pembayaran 07/07/2016	Jumlah utang pajak
Bunga	2007	16	01:0172010	
Penagihan		!0	-	
PPN, PPnBM				
dan PTLL	2007		07/07/2016	35.
Bunga Penagihan	2007	16	- 1	
PPN, PPnBM				
dan PTLL			07/07/2016	17
Bunga	2007	1-	07/07/2010	
Penagihan		16		
PPN, PPnBM				
dan PTLL			Jumlah Rp	72.

(tujuh puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejal diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara

segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DIJA

PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA

SURAT TEGURAN INI.

TINDAKAN WAKTU ITU, SESUDAH BATAS PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKSA.

(Pasal 8 ayat (1) UU PPSP)

(Pasal 12 PMK Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2010)

Medan, 02 Februari 2017 Kepala Kantor,

SULAIMAN

196801231998031001

^{*)} coret yang tidak perlu 8.5.0.23.04